

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Jurnal

Azmi, 2019, Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jurnal

Huda, Ni'matul. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Mardani, D., & Chaidir, H. (2019). Evaluasi Kewenangan Presiden Dalam Memberhentikan Kepala Daerah Melalui Perspektif Legal and Policy Review. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 171-185.

Muhammad R, 2023, Tinjauan Hukum Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Terpilih Yang Divonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Putusan Pengadilan

Kelvin Breyen Hutabarat, 2024

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Fakultas Hukum, Universitas Andalas:
Padang

Setiadi, wicipto, dan imron. Ali ., 2020, sanksi administratif terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN. Jurnal penelitian hukum volume 20 (4): 473-486.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). 12-13

Sulaeman Eman, "Akuntabilitas Kepala Daerah dalam Implementasi PSN," Jurnal Administrasi Publik, vol. 4, no. 2, 2019. Ilmu Pemerintahan, hal 90.

peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019).132.

Posner, R. A., 1986, *The Decline of Law As an Autonomous Discipline: 1962-1987*, Harv. L. Rev.,

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti

Dominikus Rato,(2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Ishaq, H., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Marzuki, Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Rahardjo, S., 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki,2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Kelvin Breyen Hutabarat, 2024

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna et al., 2021, Metodologi Penelitian Hukum, Nuta Media, Yogyakarta

Internet

<https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html#:~:text=Akuntabilitas%20hukum%20terkait%20dengan%20di%20lakukannya%20kepatuhan%20terhadap%20hukum,terkait%20dengan%20penghi%20ndaran%20penyalahgunaan%20jabatan%20C%20korupsi%20dan%20kolusi.>

<https://www.gurupendidikan.co.id/asas-legalitas/#:~:text=Asas%20legalitas%20%28the%20principle%20of%20legality%29%20yaitu%20asas,ada%20atau%20berlaku%20sebelum%20orang%20itu%20melakukan%20perbuatan.>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pengertian-supremasi-hukum-1t62b18957b41e1/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia